

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Perumusan kebijakan luar negeri feminis Kanada telah dimulai sejak tahun 1990-an. Membentuk *gender-based analysis* (GBA) merupakan tahap awal dari komitmen Kanada dalam mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek. Ketika *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) dibentuk, komitmen tersebut semakin jelas. Melalui FIAP, Kanada menyatakan bahwa dengan menegakkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum wanita, maka perdamaian dan keamanan abadi dapat tercapai. FIAP menjadikan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai alat untuk mencapai perdamaian dan keamanan abadi tersebut. Dengan memberikan bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negara-negara berkembang, Kanada percaya bahwa hal tersebut dapat tercapai.

FIAP menaungi berbagai program bantuan luar negeri Kanada dan meningkatkan komitmen kesetaraan gender di setiap program tersebut, CFLI menjadi salah satunya. CFLI sudah sejak lama menggunakan *gender-based analysis* (GBA) sebagai tolak ukur utama dalam proses pemberian dana bantuannya. Oleh sebab itu, program ini pun diintegrasikan ke dalam FIAP.

CFLI Indonesia telah banyak membantu organisasi feminis Indonesia, salah satunya Jakarta Feminist, dan mereka mengaku semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif, baik dari LSM Indonesia maupun pemerintah Indonesia. CFLI menjelaskan bahwa satu-satunya tantangan yang mereka hadapi selama pemberian dana bantuan kepada Indonesia adalah kurangnya pengetahuan terkait GBA di antara para mitra dan keadaan geografis Indonesia. Walau begitu, CFLI mengaku tidak terlalu merasa kesulitan karena salah satu program utama mereka adalah memberikan pelatihan GBA kepada mitra dan pemerintah Indonesia. Terkait keadaan geografis, CFLI selalu berusaha untuk memperluas ruang lingkungannya agar tidak hanya berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Selama masa pandemi, CFLI Indonesia tetap memberikan dana bantuan kepada organisasi-organisasi feminis Indonesia, dalam hal ini terhadap Jakarta Feminist. Hal ini membantu menopang keberlangsungan organisasi tersebut sehingga peningkatan isu kekerasan berbasis gender di Indonesia pada masa COVID-19 mendapatkan perhatian dan penanggulangan, walau terbatas dalam ranah daring. Dana bantuan CFLI Indonesia terhadap Jakarta Feminist terbukti membantu operasionalnya dengan adanya berbagai pelatihan, kelas dan diskusi online terkait isu kekerasan berbasis gender. Dana CFLI Indonesia juga membantu pengembangan awal sistem direktori Cari Layanan yang diinisiasi oleh Jakarta Feminist sebagai salah satu penanggulangan isu kekerasan berbasis gender pada tahun 2020—2021. Selain CFLI Indonesia, Jakarta Feminist juga mendapat dana bantuan dari CFLI ASEAN yang digunakan untuk pengembangan jejaring feminis di regional Asia Tenggara, *Southeast Asia Feminist Action Movement* (SEAFAM).

Berdasarkan hasil analisa tersebut, penulis menyatakan bahwa implementasi bantuan luar negeri feminis Kanada melalui CFLI Indonesia kepada Jakarta Feminist selama periode 2017—2021, termasuk pada masa pandemic COVID-19, berjalan dengan lancar. Sejauh ini, kedua belah pihak tidak menemukan tantangan atau hambatan yang pelik dan signifikan dalam proses pengajuan dan pemberian dana. Program-program yang diprakarsai oleh Jakarta Feminist pun berjalan lancar walau pada masa pandemi COVID-19 semua itu harus dilakukan secara daring.

Dalam proses analisa kinerja CFLI Indonesia dan Jakarta Feminist, penulis menemukan beberapa hal menarik yang patut untuk disebutkan sekilas—jika tidak secara gamblang—dalam tulisan ini. *Yang pertama* adalah bahwa FIAP belum bisa disebut sebagai kebijakan luar negeri feminis. FIAP merupakan program bantuan luar negeri berorientasi feminis dibawah departemen Pembangunan Internasional Kanada. Oleh sebab itu, penulis dapat memahami kritik dari para peneliti terdahulu, seperti: Jessica Cadesky, Jennifer Thomson, dan Sam E. Morton, yang mengatakan bahwa FIAP masih sangat ambigu dan belum memiliki pondasi yang jelas. Hal ini disebabkan

karena FIAP sendiri belum menjadi kebijakan luar negeri feminis yang melihat isu-isu gender sebagai permasalahan utama yang harus ditanggulangi. Dapat dikatakan bahwa FIAP tercipta untuk menaungi komitmen Kanada dalam mencapai perdamaian dan keamanan dunia dengan menggunakan agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Maka dari itu, FIAP terkesan mencampuradukkan konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, walau pun pada dasarnya keduanya saling berkaitan.

*Yang kedua*, penulis melihat bahwa FIAP memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan-tujuan dari suatu bantuan luar negeri untuk pembangunan internasional, yaitu Humanitarianisme (*Humanitarianism*), kepentingan negara (*Enlightened self-interest*), dan reputasi atau afirmasi negara (*Reputation/self-affirmation*). Semuanya terproyeksi dalam visi misi FIAP yang mengedepankan promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai cara paling efektif untuk memberantas berbagai isu global. Selain itu, identitas Kanada sebagai negara yang feminis dan pro kesetaraan gender sudah dikenal di ranah internasional. Dengan mencanangkan FIAP dan mengintegrasikan berbagai program bantuan internasionalnya, maka Kanada semakin menegaskan identitasnya sebagai negara feminis dan pro kesetaraan gender. Hal ini juga, secara tidak langsung, menjadikan Kanada sebagai aktor utama dan/atau terkemuka dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita.

Pada akhirnya, walau FIAP Kanada masih dalam tahap pengembangan dan perumusan menjadi kebijakan luar negeri feminis, penulis berpendapat bahwa itu sudah menjadi langkah awal yang bagus. Komitmen yang ditunjukkan pada bidang aksi FIAP Kanada untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sangat kuat sejauh ini. Walau Kanada tidak melihat kesetaraan gender sebagai masalah utama seperti halnya Swedia, namun mereka tetap menunjukkan dedikasi dan upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Di samping itu, cara pendekatan FIAP Kanada dengan menyelaraskan bidang aksinya dengan SDGs merupakan hal yang patut disorot sebab itu memudahkan pengarusutamaan isu gender di kalangan masyarakat.

## 1.2 Saran

### 1.2.1 Saran Teoritis

1. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang konsep *Feminist Foreign Policy* dan perbandingannya dengan kebijakan luar negeri pada umumnya.
2. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang perkembangan *Feminist Foreign Policy* di Kanada, Swedia dan negara lainnya.

### 1.2.2 Saran Praktis

1. Bagi pemerintah Kanada dan Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan mewujudkan kebijakan luar negeri yang feminis.
2. Bagi masyarakat Kanada, Indonesia dan dunia untuk semakin sadar dan memahami keterkaitan antara isu gender dengan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan sehingga kesetaraan gender dapat tercapai.